

KARAKTERISTIK PENGEMIS PEREMPUAN DI KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN

Umi Supraptiningsih

(Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan/umish@yahoo.co.id)

Abstrak:

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan kepada fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana tercantum dalam Pasal 34. Para gelandangan, pengemis, maupun anak-anak jalanan dapat pula dikategorikan sebagai fakir miskin untuk kemudian dipelihara oleh negara. Pada kenyataan dilapangan utamanya di Kabupaten Pamekasan potret para pengemis sudah menjadi tontonan dan kebiasaan yang memprihatinkan. Pertanyaannya, apakah memang para pengemis tersebut betul-betul memenuhi kriteria sebagaimana definisi fakir miskin? Ini yang perlu kita cermati bersama, jangan-jangan mengemis dipakai sebagai kebiasaan atau mata pencaharian. Peneliti berusaha melalui penelitian ini ingin mengetahui dan memetakan karakteristik pengemis perempuan di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tersebut.

Pandangan dan pemahaman pengemis tentang kebutuhan minimal hidup hanyalah kebutuhan makan dan minum saja. Keinginan para pengemis untuk mengakhiri kebiasaan mengemis dan pekerjaan yang dapat memberi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selama para pengemis perempuan melakukan kegiatan mengemis baik di jalanan, pertokoan, instansi pemerintah maupun dari rumah ke rumah, sebenarnya ada beban psikologis dari mereka. Ada perasaan malu walaupun tanggapan atau sikap masyarakat terhadap mereka adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Mereka berkeinginan untuk mengakhiri kebiasaan mengemisnya dengan alasan mereka sudah tua dan tidak mampu lagi berjalan, mereka juga malu tetapi mereka menginginkan pekerjaan yang tidak berat bagi mereka karena kebutuhan untuk mencukupi beban hidup juga harus mereka lakukan.

Kata Kunci:

Karakteristik, Pengemis Perempuan

Abstract:

The constitution 1945 has guaranteed the poor and neglected children as stated in Article 34. The homeless, beggars and street children can also be categorized as poor that are maintained by the state. In fact, the portraits of beggars, especially in Pamekasan regency have become a spectacle and terrible habits. The question is whether the beggars obviously meet the criteria of the poor? This is what we need to look deeply as begging become habit or living. In this study, the researcher wanted to know and map the characteristics of female beggars in the District of Tlanakan Pamekasan. Beggar's view and understanding of the needs of life is merely about to eat and to drink. The desire to stop their habits and having a job may become solutions for them to fill their needs. Female beggars actually have a psychological concern when they are begging in the streets, shopping centers, government offices, and door to door. They feel ashamed to even if people's responds and attitude towards them are normal. They desired to end the habits as they are old and no longer be able to walk; so that, they do an easy thing to support their own needs.

Key words:

Characteristics, Female Beggars

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Yang dimaksud dengan fakir miskin di sini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Fakir miskin dapat juga berarti orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Para gelandangan, pengemis, maupun anak-anak jalanan dapat pula dikategorikan sebagai fakir miskin untuk kemudian dipelihara oleh Negara.

Pada kenyataan dilapangan utamanya di Kabupaten Pamekasan potret para pengemis sudah menjadi tontonan dan kebiasaan yang memprihatinkan. Pertanyaannya, apakah memang para pengemis tersebut betul-betul memenuhi kriteria sebagaimana definisi fakir miskin? ini yang perlu kita cermati bersama,

jangan-jangan mengemis dipakai sebagai kebiasaan atau mata pencaharian. Selanjutnya apakah tidak ada pekerjaan yang layak untuk dikerjakan sebagai sumber mata pencaharian bagi mereka? Hal yang demikian tentunya harus juga kita teliti secara cermat.

Para pengemis yang sering berada di pertokoan, tempat wisata, dari rumah ke rumah, dan perkantoran bahkan sampai masuk di areal lembaga pendidikan utamanya dilakukan oleh para perempuan, mereka berasal dari Kecamatan Tlanakan dan Proppo. Setiap pagi mereka berangkat berduyun-duyun naik angkutan pedesaan kemudian menyebar di beberapa tempat dan menjelang sore mereka pulang ke rumah masing-masing.

Dari data Statistik menunjukkan bahwa luas wilayah Kecamatan Tlanakan 48,10 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 59.156 jiwa dan pertambahan penduduk rata-rata tiap tahun 1,40. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Pamekasan 792,30 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 795,918 dan pertambahan penduduk rata-rata tiap tahun 1,45¹. Hasil data awal ada sekitar 30 orang perempuan yang kesehariannya berprofesi sebagai pengemis mereka berasal dari tiga desa yaitu Desa Larangan Tokol, Panglegur dan Branta Tinggi.

Bagaimana dengan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan terhadap para pengemis?, Pemerintah sudah sering melakukan pembinaan dan pemberian bantuan sosial berupa modal usaha seperti ketrampilan menjahit dan diberikan mesin jahit, bagi peternak diberi sapi, kambing akan tetapi untuk mengurangi jumlah pengemis saja belum berhasil. Peneliti berusaha melalui penelitian ini ingin mengetahui dan memetakan karakteristik pengemis perempuan di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tersebut.

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu:

1. Sebagai sumbangan teoritis berupa khazanah keilmuan dan analisa dalam memetakan karakteristik pengemis dan sekaligus mengetahui tingkat kemiskinan serta budaya dikalangan para pengemis perempuan.
2. Sebagai bahan informasi dan bahan kajian penting yang diharapkan mampu menggugah minat penelitian lebih lanjut.

Sedangkan secara praktis, dapat dipergunakan:

1. Sebagai evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dalam memberikan ketrampilan dan bantuan modal usaha bagi masyarakat.

¹ Data Pamekasan dalam angka – Badan Pusat Statistik Kab. Pamekasan 2013

2. Sebagai bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah untuk mempersiapkan diri dengan memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka mempersiapkan masyarakat sebagai masyarakat Madani.

Secara spesifik penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang memiliki nilai manfaat terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan untuk melakukan perubahan terhadap perilaku para pengemis perempuan di Kecamatan Tlanakan, Kab. Pamekasan.

Agar terwujud kesamaan visi dan persepsi serta pemahaman di antara para pembaca dan pengguna temuan hasil penelitian diperlukan penjelasan tentang makna istilah-istilah kunci yang digunakan berkaitan dengan topik penelitian ini.

Penelitian tentang Karakteristik Pengemis Perempuan di Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan yang dipilih oleh peneliti merupakan ide yang sering peneliti lontarkan di forum-forum pemberdayaan perempuan karena peneliti terlibat langsung dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kab. Pamekasan. Dari tahun ke tahun untuk mengurangi para pengemis perempuan ini belum pernah berhasil. Berbagai cara yang sudah dilakukan pemerintah daerah dengan cara memberikan keterampilan dan modal usahapun sudah dilakukan namun tidak ada hasilnya.

Harapan dari penelitian ini, kebiasaan mengemis yang dipakai sebagai mata pencaharian yang oleh perempuan di Kec. Tlanakan tersebut dapat berhenti dan mereka mempunyai kegiatan/mata pencaharian lain sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Dalam penelitian ini akan terfokus pada pengemis perempuan yang berasal dari Kecamatan Tlanakan, Kab. Pamekasan. Pemilihan lokasi penelitian didasari bahwa para pengemis yang melakukan kegiatannya baik di pertokoan, perkantoran, tempat wisata maupun lembaga pendidikan mayoritas berasal dari tiga Desa yang berada di Kecamatan Tlanakan, yaitu Desa Larangan Tokol, Panglegur dan Desa Branta Tinggi. Begitu pula pemilihan pengemis perempuan karena para pengemis tersebut 90 % dilakukan oleh perempuan.

Potret pengemis membuat pandangan tidak nyaman bagi para pendatang atau tamu yang berkunjung ke Kab. Pamekasan, gambaran kemiskinan yang sering nampak bahkan di beberapa tempat wisata di Kab. Pamekasan (api tak kunjung padam dan arek lancor), etika para pengemispun kurang sopan, ada kesan pengemis memaksa untuk diberi (dengan cara menarik-narik baju para pengunjung). Lebih-lebih pengemis yang sudah berani memasuki

areal lembaga pendidikan, mereka tidak lagi memperdulikan bahwa di kelas sedang terjadi proses belajar mengajar yang membutuhkan konsentrasi.

Hal yang demikian juga membuat suasana di areal publik seperti perkantoran dan pertokoan menjadi pemandangan yang tidak nyaman. Kita sebagai masyarakat Pamekasan merasa malu dan dipermalukan dengan hal-hal yang seharusnya tidak ada didepan kita. Hasil dari penelitian ini nantinya, peneliti akan menyampaikan antara lain kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial untuk menindaklanjuti dalam bentuk program pemberdayaan perempuan serta didukung dengan Peraturan Daerah tentang Larangan mengemis seperti dibeberapa daerah lainnya.

Permasalahan

Berangkat dari beberapa hal di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman para pengemis tentang pekerjaan sebagai mata pencaharian dan pemahaman tentang mengemis?
2. Bagaimana pandangan dan pemahaman pengemis tentang kebutuhan minimal hidup?
3. Bagaimana pandangan para pengemis tentang ketersediaan lapangan kerja dan peran pemerintah dalam akses lapangan kerja?
4. Bagaimana dengan keperdulian pemerintah daerah dalam mengurangi beban hidup atau kondisi ekonomi para pengemis?
5. Adakah keinginan para pengemis untuk mengakhiri kebiasaan mengemis? dan pekerjaan apa yang dapat memberi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) karena data yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka² yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya untuk kemudian data dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhirnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Tujuannya untuk memberikan data yang

² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 29.

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lainnya.³ Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang benar dan jelas, sehingga dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang mempunyai kebiasaan mengemis.

Pada penelitian kualitatif juga ditandai dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berupa *participant observation* dan *indepth interview* sebagai instrumen pengumpulan data utama. Pendekatan kualitatif yang digunakan bersifat multimetode dalam fokusnya dan menggunakan pendekatan alamiah serta penafsiran terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Pemilihan pendekatan ini dianggap tepat karena yang diinginkan peneliti adalah permasalahan dalam setting alamiah dan berusaha untuk memaknai dan menafsirkan fenomena yang ada berdasarkan apa yang dirasakan oleh para informan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan murni tentang fenomena yang diteliti, dan ini tidak mungkin dapat diperoleh jika tidak menggunakan pendekatan kualitatif.

Selain pendekatan kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah bentuk dan isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan fakir miskin dan anak-anak terlantar serta kegiatan mereka dalam ranah publik. Pendekatan studi kasus (*case study*) dipergunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang timbul berkaitan dengan kegiatan para pengemis di tengah-tengah masyarakat yang sering melanggar hak-hak publik. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menelaah sejarah tentang asal usul para pengemis melakukan kegiatannya yang dikaitkan dengan budaya masyarakat. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan pemberdayaan perekonomian masyarakat dalam rangka menekan tingkat kemiskinan.

³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1988), hlm 42

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 92

2. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh pemahaman, makna, dan penafsiran atas fenomena murni dan simbol-simbol interaksi dalam setting penelitian diperlukan keterlibatan dan penghayatan langsung oleh peneliti terhadap subjek terteliti di lapangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data.

Beberapa keuntungan yang dapat diraih bagi peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini, antara lain peneliti dapat: (1) bersikap responsif dan dapat menyesuaikan diri (*responsive and adaptive*) dalam berinteraksi dengan subjek terteliti; (2) menekankan pada deskripsi dan pemahaman yang utuh (*wholistic emphasis*); (3) melakukan perluasan atau pengembangan konseptual berdasarkan ilmu pengetahuan (*knowledge based expansion*); (4) melakukan kesiapan atau kesegeraan dalam memroses data (*processing data immediacy*); (5) memanfaatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan menyusun ringkasan dari data yang diperoleh (*opportunity for clarification and summarization*); serta (6) melakukan eksplorasi untuk mengetahui berbagai respons yang unik dan khas (*explore a typical or idiosyncratic responses*).

Kehadiran dan keterlibatan peneliti dalam setting penelitian ini mengambil 4 posisi dari 5 posisi, yaitu pengamatan nonpartisipasi (*nonparticipant observation*), pengamatan partisipasi pasif (*passive participant observation*), partisipasi secara moderat (*moderate participation*), dan partisipasi secara aktif (*active participation*). Sedangkan partisipasi penuh (*complete participation*) dalam penelitian ini tidak dilakukan karena dapat mengakibatkan perolehan data menjadi bias.

Dengan demikian, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menemukan makna, memperoleh pemahaman, dan merumuskan interpretasi atas perilaku subjek terteliti dibandingkan bila menggunakan instrumen noninsani. Pada sisi lain, peneliti sebagai instrumen kunci dapat melakukan konfirmasi dan pengecekan ulang kepada subjek terteliti apabila perolehan data dirasakan masih kurang lengkap atau kurang sesuai dengan interpretasi yang dirumuskan peneliti, misalnya dengan menggunakan teknik pengecekan anggota (*member check*).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Panglegur, Desa Larangan Tokol, dan Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan,

Kabupaten Pamekasan. Pemilihan dan penentuan lokasi didasari oleh pertimbangan berikut ini. *Pertama*, semua informan dalam penelitian ini yaitu para pengemis perempuan yang sering melakukan kegiatan baik di perkotaan yaitu di kantor-kantor instansi pemerintah dan non pemerintah, pertokoan dari rumah ke rumah, begitu pula di tempat-tempat rekreasi pemerintah di wilayah Pamekasan dan mereka berasal dari 3 Desa tersebut; *Kedua*, dalam beberapa kesempatan peneliti juga terlibat dalam beberapa agenda pemerintah daerah untuk pendamping pemberdayaan perempuan.

4. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data kondisi para pengemis perempuan. Jenis data dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan hasil kegiatan wawancara.

Sejalan dengan rancangan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni *qualitative design*, maka penentuan “sampel” dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penggunaan teknik *purposive sampling* tersebut menganut prinsip *funnel design*, yakni dengan cara menghimpun data seluas-luasnya untuk kemudian dilakukan penyempitan dan penajaman sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memperoleh kedalaman dan keabsahan data, peneliti mencari dan menyeleksi informan guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Secara teknis, penentuan informan dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Spradley⁵ yang menyatakan bahwa: (1) informan telah cukup lama tinggal dan “menyatu” dalam seting penelitian, (2) informan masih aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan seting penelitian, (3) informan memiliki kesempatan yang leluasa dan menyatakan kesediaan untuk dimintai informasi, (4) informan beritikad untuk memberikan informasi yang sebenarnya, dan (5) informan dapat diperlakukan sebagai “guru baru” bagi peneliti. Para informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, para pengemis perempuan di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Panglegur, Desa Larangan Tokol, Desa Branta Tinggi Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

Agar dapat dihimpun sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan fokus penelitian informan dipilih di antara individu yang banyak tahu tentang masalah yang dikaji. Cara memilihnya harus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam menghimpun data. Untuk itu digunakan teknik *snowball sampling*. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin secara terus-menerus dari

⁵ Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980

informan satu ke informan lainnya. Melalui cara itu, dimungkinkan perolehan data semakin banyak, lengkap, dan mendalam. Pengumpulan informasi baru dihentikan jika data yang dihimpun menemukan titik jenuh (*data saturation*) yakni data tidak berkembang lagi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode interaktif dan noninteraktif. Metode interaktif dilakukan pada saat melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipasi, sedangkan metode noninteraktif diarahkan pada analisis isi dokumen. Penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang holistik dan integratif tentang fokus penelitian. Ketiga teknik pengumpulan data ini merupakan teknik dasar dalam penelitian kualitatif.

a. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki⁶. Teknik ini dipergunakan hampir pada seluruh proses pengumpulan data termasuk dalam melakukan penjajakan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yakni mengamati gejala obyektif yang terkait langsung dengan fokus penelitian. Teknik Observasi digunakan untuk mengetahui kondisi pengemis perempuan di Desa Panglegur, Larangan Tokol dan Branta Tinggi.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam (*deep interview*), maksudnya teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara bebas kepada *interviewee* (orang yang sedang diwawancarai), namun sebelumnya ada panduan atau pedoman wawancara yang telah dibuat. Tujuan wawancara yang demikian untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Teknik wawancara diperlukan untuk mengetahui pemahaman dan keinginan para pengemis perempuan untuk mengakhiri kegiatan mengemisnya dengan beralih pada kegiatan pemberdayaan perekonomian, selanjutnya hasilnya akan terlihat dalam beberapa *field notes* yang merupakan data untuk selanjutnya dianalisis.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Affist, 1990), hlm 136

c. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang keinginan-keinginan dan kesepakatan mereka untuk beralih profesi dengan melakukan pemberdayaan perekonomian dan indikator program pemberdayaan yang diperlukan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pelacakan informasi dan pengaturan secara sistematis atas catatan lapangan berupa transkrip wawancara yang berhasil dihimpun peneliti. Hasil analisis dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemahaman bagi subjek peneliti sekaligus dapat disajikan sebagai bahan laporan temuan hasil penelitian kepada pihak lain. Analisis data dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian data (yakni menelaah, menata, dan mengklasifikasikan data menjadi satuan-satuan yang mudah dikelola), sintesis data, pencarian pola, pengungkapan hal-hal penting yang bermakna, dan penetapan hasil analisis sebagai bahan penarikan teori substantif dan susunan simpulan penelitian. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan.

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi empat jenis analisis, yaitu (1) analisis teoretik; (2) analisis hasil wawancara; (3) analisis hasil observasi; dan (4) analisis dokumen.

Observasi secara mendalam dilakukan untuk memahami fenomena yang terjadi sehingga dapat diidentifikasi karakteristik setting penelitian dan unsur-unsur yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk itu peneliti memusatkan perhatian secara cermat, rinci dan sinambung atas konteks dan topik penelitian seperti data tentang para pengemis perempuan di Desa Panglegur, Larangan Tokol dan Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan. Melalui observasi demikian, dapat diperoleh data tentatif sebagai bahan untuk menemukan makna dan pemahaman yang relevan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk validitas data temuan, peneliti mengecek temuan dengan menggunakan teknik pengecekan sebagai berikut:

a. Perpanjangan kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam pengumpulan data sangat vital, dengan perpanjangan dan menambah volume kehadiran di lokasi penelitian, peneliti dapat menguji kebenaran informasi dan membangun kepercayaan subyek.

b. Observasi yang diperdalam

Observasi yang diperdalam merupakan peningkatan intensitas ketekunan dalam melakukan pengamatan (pengamatan dengan lebih jeli dan lebih seksama) untuk memperoleh data akurat sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik memperoleh keabsahan data dengan menggunakan beberapa sumber data⁷. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik triangulasi, yaitu: 1. Triangulasi Sumber data, dan 2. Triangulasi Metode Pengumpulan data.

Triangulasi Sumber Data dilakukan dengan cara: (1) membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan ucapan informan didepan umum dan ucapannya secara pribadi, (3) membandingkan ucapan informan tentang seting pada saat tertentu dan pada saat yang lain. Cara ini dilakukan untuk memeriksa derajat konsistensi pernyataan tentang pandangan mereka, (4) membandingkan perspektif informan satu dengan informan yang lain dalam level pengalaman, jabatan, atau pendidikan yang berbeda tentang persoalan serupa. Perbandingan demikian juga dilakukan antar rekaman hasil wawancara dan isi dokumen tentang masalah yang sama.

Triangulasi metode pengumpulan data penelitian dilakukan dalam dua tahap. Tahap (1) memeriksa derajat kepercayaan atas temuan penelitian dengan teknik-teknik pengumpulan data, yakni kesesuaian data antara penggunaan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap (2) memeriksa derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama.

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi informasi data dan intepretasinya yang telah terekam secara tertulis kepada informan untuk diberi komentar, hal dimaksud untuk mendapatkan penambahan atau pengurangan informasi maupun koreksi seperlunya. Keterangan dari informan tersebut dipergunakan untuk memperbaiki rekaman catatan lapangan. Teknik ini dilakukan hanya pada informan kunci.

Pengecekan teman sejawat, dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang terkumpul beserta temuan penelitian yang dihasilkan dengan

⁷ Lexy J. Moleong memberikan definisi triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Moleong, *Metodologi*, hlm 178-179.

beberapa kolega yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang relevan dalam kajian penelitian ini.

d. Audit Trial Sendiri

Audit trial dimaksudkan menjamin kebenaran penelitian. Dengan audit sendiri dilakukan pemeriksaan terhadap (1) data mentah (catatan lapangan), (2) hasil analisis data, (3) hasil sintesis data, (4) catatan tentang proses yang digunakan seperti metodologi, desain dan sebagainya yang dilakukan oleh peneliti.

D. Hasil Penelitian

1. Pemahaman para pengemis tentang pekerjaan sebagai mata pencaharian dan pemahaman tentang mengemis

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Dari hasil penelitian pemahaman para pengemis perempuan yang berasal dari Kecamatan Tlanakan khususnya dari 3 Desa yaitu Desa Panglegur, Desa Larangan Tokol dan Desa Branta Tinggi yang mereka pahami tentang pekerjaan sebagai mata pencaharian adalah bekerja yang menghasilkan uang sedangkan pemahaman tentang pengemis adalah bekerja dengan cara meminta-minta sehingga mendapatkan uang dan atau beras yang dapat dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Berbicara tentang pengemis, yang selalu ada dibenak kita adalah gambaran kemiskinan, orang-orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja atau orang yang memiliki cacat fisik. Ada beberapa kategori yang melatar belakangi seseorang menjadi pengemis : *Pertama*, Kemiskinan : mereka tergolong orang-orang yang tidak lagi mempunyai inovasi lain untuk menutupi kebutuhan hidup sehingga dengan cara mengemis adalah solusi mudah dan cepat mendapatkan penghasilan, dengan tanpa mempertimbangkan unsur malu. *Kedua*, Faktor cacat fisik: Seseorang yang mengalami cacat fisik dia tidak lagi mampu untuk bekerja karena keterbatasan panca inderanya, maka dengan terpaksa mereka menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, Faktor lanjut usia : orang yang sudah lanjut usia, mau bekerja tidak mampu secara fisik sedangkan anak atau kerabatnya juga tidak mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka menjadi pengemis, kondisi ini sangat memprihatinkan, *Keempat*, Faktor malas :Ada kelompok orang tertentu yang seharusnya dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi mereka tidak lakukan dan memilih untuk menjadi pengemis. Dan *kelima*, Faktor budaya: ada beberapa budaya masyarakat yang menguji para pemudanya atas kekuatan

mental malu dengan cara mengemis tetapi hal yang demikian menjadi pembiasaan dan terus menerus sampai turun temurun.

Faktor yang mendorong para pengemis melakukan kegiatan mengemis di Kecamatan Tlanakan lebih banyak semula disebabkan karena faktor kemiskinan. Kondisi Sumber Daya Alam yang gersang, sumber air yang tidak ada, sumber daya manusia yang juga tidak mempunyai skill atau keterampilan serta tidak tersedia lapangan pekerjaan yang dapat mereka perbuat, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka harus tetap mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta (mengemis). Berlanjut secara terus menerus sampai keturunan mereka yang kemudian menjadikan kegiatan mengemis mereka nikmat walaupun mereka sudah tergolong mampu atau tidak miskin lagi.

Faktor kedua yang melatar belakangi penduduk Desa Branta Tinggi khususnya berprofesi sebagai pengemis, adalah karena faktor budaya. Cerita budaya yang terjadi di Kecamatan Tlanakan khususnya Desa Branta Tinggi, sebagai berikut : ada menceritakan masyarakat tentang asal- usul api tak kunjung padam (*jengkah*) yang ada kaitannya dengan kebiasaan mengemis penduduk Desa Branta Tinggi. Dari hasil pengamatan bahwa terdapat makam *Kyai Moko* yang nama aslinya *Kyai Saidul Mukarrom*, yang hidup di jaman kerajaan/sebelum kolonial, *Kyai Moko* inilah orang yang menemukan sumber api, Tempat Asahan, batu susun (*tompang*). Kondisi bangunan makam sangat baik, berbeda dengan bangunan rumah penduduk yang rata-rata di bawah standar. Makam tersebut telah direnovasi oleh pemerintah sebagai bagian dari asset sejarah, Makam ini cukup legendaris karena berkaitan dengan keberadaan api tak kunjung padam, jembatan dan tempat asahan pancing (*gladak gangsen*), serta kisah perkawinan *Kyai Moko* dengan puteri raja Blambangan yang minta maskawin intan. Lalu ia berusaha dengan cara setiap malam memancing ikan di atas *batu tompang* sehingga tidak kena ombak, lalu ia mengambil mata ikannya saja dan dimasukkan ke tempat khusus (peti). Dari kumpulan mata ikan itu lalu menjadi intan. Dari sinilah isteri beliau dikenal dengan predikat *Nyai Énten*. Pada saat *Kyai Moko* masih ada, masyarakat di lingkungan Jengkah terkenal pelit (kikir), sehingga ada ucapan dari *Kyai Moko* yang sampai sekarang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat di lingkungan Jengkah tersebut, bahwa “Masyarakat Jengkah tidak akan bisa hidup layak bilamana tidak menjual rasa malu – meminta-minta (mengemis) di luar daerah”.⁸

⁸ Umi Supraptiningsih, *Pengemis Anak di Kabupaten Pamekasan (Karakteristik, Sosial, Ekonomi dan Perlindungannya)*, penelitian kolektif DIPA STAIN Pamekasan, 2007

Didukung dengan sikap dan pandangan masyarakat yang menganggap kehadiran pengemis adalah hal yang sudah biasa saja bahkan dari segi perlindungan, mereka merasa aman-aman saja sehingga perbuatan mengemis tersebut bagi mereka dianggap sebagai pekerjaan utama atau mata pencaharian dan justru pekerjaan lain sebagai pemulung adalah pekerjaan tambahan.

Dalam satu hari rata-rata mereka mendapatkan hasil dari mengemis sebesar Rp 15.000 sampai Rp 30.000, jika dalam satu keluarga ada 2 atau 3 orang yang juga mengemis, maka sudah lebih dari cukup pendapatan mereka dalam 1 hari. Selain mengemis mereka juga sebagai pemulung dan bekerja serabutan (*resarean*) dengan menunggu orang-orang yang membutuhkan.

2. Pandangan dan pemahaman pengemis tentang kebutuhan minimal hidup

Untuk membahas kebutuhan minimal hidup manusia, tentunya kita harus menggunakan rujukan tentang Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Standar KHL adalah dasar dalam penetapan Upah Minimum. Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Sebelumnya menetapkan Upah Minimum Propinsi, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tetapi apa yang dimaksud survey KHL, komponen kebutuhan hidup apa yang disurvei dan mekanisme standarisasi KHL hingga menjadi penetapan Upah Minimum. Sejak diundangkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat (4), yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Namun, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 direvisi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan KHL. Komponen yang termasuk dalam standar KHL, terdiri dari : makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Selengkapnya

mengenai komponen-komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 :

No	Komponen	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
I Makanan dan Minuman			
1	Beras Sedang	Sedang	10 kg
2	Sumber Protein :		
	a. Daging	Sedang	0.75 kg
	b. Ikan Segar	Baik	1.2 kg
	c. Telur Ayam	Telur ayam ras	1 kg
3	Kacang-kacangan : tempe/tahu	Baik	4.5 kg
4	Susu bubuk	Sedang	0.9 kg
5	Gula pasir	Sedang	3 kg
6	Minyak goreng	Curah	2 kg
7	Sayuran	Baik	7.2 kg
8	Buah-buahan (setara pisang/pepaya)	Baik	7.5 kg
9	Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3 kg
10	Teh atau Kopi	Celup/Sachet	2 Dus isi 25 = 75 gr
11	Bumbu-bumbuan	Nilai 1 s/d 10	15%
JUMLAH			
II Sandang			
12	Celana panjang/ muslim	Rok/Pakaian Katun/sedang	6/12 potong
13	Celana pendek	Katun/sedang	2/12 potong
14	Ikat Pinggang	Kulit sintetis, polos, tidak branded	1/12 buah
15	Kemeja lengan pendek/blouse	Setara katun	6/12 potong
16	Kaos oblong/ BH	Sedang	6/12 potong
17	Celana dalam	Sedang	6/12 potong
18	Sarung/kain panjang	Sedang	1/12 helai

19	Sepatu	Kulit sintetis	2/12 pasang
20	Kaos Kaki	Katun, Polyester, Polos, Sedang	4/12 pasang
21	Perlengkapan pembersih sepatu		
	a. Semir sepatu	Sedang	6/12 buah
	b. Sikat sepatu	Sedang	1/12 buah
22	Sandal jepit	Karet	2/12 pasang
23	Handuk mandi	100cm x 60 cm	2/12 potong
24	Perlengkapan ibadah		
	a. Sajadah	Sedang	1/12 potong
	b. Mukena	Sedang	1/12 potong
	c. Peci,dll	Sedang	1/12 potong
	JUMLAH		
III Perumahan			
25	Sewa kamar	dapat menampung jenis KHL lainnya	1 bulan
26	Dipan/ tempat tidur	No.3, polos	1/48 buah
27	Perlengkapan tidur		
	a. Kasur busa	Busa	1/48 buah
	b. Bantal busa	Busa	2/36 buah
28	Sprei dan sarung bantal	Katun	2/12 set
29	Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48 set
30	Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48 buah
31	Sapu	Ijuk sedang	2/12 buah
32	Perlengkapan makan		
	a. Piring makan	Polos	3/12 buah
	b. Gelas minum	Polos	3/12 buah
	c. Sendok garpu	Sedang	3/12 pasang
33	Ceret aluminium	Ukuran 25 cm	1/24 buah
34	Wajan aluminium	Ukuran 32 cm	1/24 buah
35	Panci aluminium	Ukuran 32 cm	2/12 buah

36	Sendok masak	Alumunium	1/12 buah
37	Rice Cooker ukuran 1/2 liter	350 watt	1/48 buah
38	Kompor dan perlengkapannya		
	a. Kompor 1 tungku	SNI	1/24 buah
	b. Selang dan regulator	SNI	10 liter
	c. Tabung Gas 3 kg	Pertamina	1/60 buah
39	Gas Elpiji	masing-masing 3 kg	2 tabung
40	Ember plastik	Isi 20 liter	2/12 buah
41	Gayung plastik	Sedang	1/12 buah
42	Listrik	900 watt	1 bulan
43	Bola lampu hemat energi	14 watt	3/12 buah
44	Air Bersih	Standar PAM	2 meter kubik
45	Sabun cuci pakaian	Cream/deterjen	1.5 kg
46	Sabun cuci piring (colek)	500 gr	1 buah
47	Setrika	250 watt	1/48 buah
48	Rak portable plastik	Sedang	1/24 buah
49	Pisau dapur	Sedang	1/36 buah
50	Cermin	30 x 50 cm	1/36 buah

JUMLAH

IV Pendidikan

51	Bacaan/radio	Tabloid/4 band	4 buah/ (1/48)
52	Ballpoint/pensil	Sedang	6/12 buah

JUMLAH

V Kesehatan

53	Sarana Kesehatan		
	a. Pasta gigi	80 gram	1 tube
	b. Sabun mandi	80 gram	2 buah
	c. Sikat gigi	Produk lokal	3/12 buah
	d. Shampo	Produk lokal	1 botol 100 ml
	e. Pembalut atau alat cukur	Isi 10	1 dus/set
54	Deodorant	100ml/g	6/12 botol

55	Obat anti nyamuk	Bakar	3 dus
56	Potong rambut	Di tukang cukur/salon	6/12 kali
57	Sisir	Biasa	2/12 buah
	JUMLAH		
VI Transportasi			
58	Transportasi kerja dan lainnya	Angkutan umum	30 hari (PP)
	JUMLAH		
VII Rekreasi dan Tabungan			
59	Rekreasi	Daerah sekitar	2/12 kali
60	Tabungan	(2% dari nilai 1 s/d 59)	2%
	JUMLAH		
	JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VII)		

Dari hasil sumber data primer penelitian, didapatkan bahwa pandangan dan pemahaman mereka tentang kebutuhan minimal hidup hanyalah kebutuhan makan dan minum saja. Untuk mencukupi kebutuhan makan dalam satu hari mereka dapatkan sebanyak 2 (dua) kali dan kadang-kadang saja 3 (tiga) kali.

Penghasilan yang mereka peroleh dalam tiap hari rata-rata Rp 15.000 sampai dengan Rp 30.000, sehingga kalau dibuat rata-rata pendapatan mereka tiap orang dalam satu bulan rata-rata Rp 600.000 sampai Rp 900.000. Bilamana kita lihat upah minimum kabupaten pekerja di Kab. Pamekasan sebesar Rp 1.209.900 tiap bulan.

Sedangkan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh masing-masing keluarga selain makan dan minum dalam satu bulan rata-rata : untuk kebutuhan listrik sebesar Rp 30.000, pembelian air sebesar Rp 20.000, dan uang sekolah anak (dengan pendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama) atau untuk uang jajan sebesar Rp 100.000.

Kebutuhan akan papan/rumah, rata-rata pengemis perempuan menempati rumah yang berasal dari warisan orang tua atau nenek moyang mereka. Sedangkan untuk kebutuhan sandang/pakaian mereka kurang memperhatikan, dalam satu tahun mereka hanya membeli satu kali saja dan juga kadang-kadang ada orang-orang yang merasa iba sehingga diberi.

Mengingat pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak dapat dihindari sedangkan penghasilan yang relatif belum dapat mencukupi, maka kehidupan mereka sangat jauh dari kecukupan. Sebagai tambahan penghasilan mereka mengemis sambil mencari botol-botol, koran, kardus untuk dapat dijual (sebagai pemulung).

3. Pandangan para pengemis tentang ketersediaan lapangan kerja dan peran pemerintah dalam akses lapangan kerja

Tenaga kerja dan lapangan kerja selalu menjadi pembahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan demografi wilayah yang seharusnya mempunyai potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Hampir setiap tahun, para tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dipulangkan karena tidak mengantongi surat-surat atau ijin sebagai tenaga kerja ke luar negeri, begitu pula setiap hari buruh yang dirayakan di Indonesia selalu diwarnai dengan gerakan buruh turun ke jalan. Masalah yang dibawa selalu sama yakni soal kesejahteraan. Mereka selalu menuntut kesejahteraan yang lebih baik. Padahal, setiap tahun pemerintah selalu menaikkan upah minimum provinsi (UMP) yang dijadikan rujukan menentukan besaran upah bagi buruh. Tapi kenyataannya, buruh selalu meminta kenaikan gaji yang lebih besar.

Persoalan terkait ketenagakerjaan tidak hanya terjadi pada sumber daya manusia (SDM) saja. Hasil kajian Bank Dunia dan CSIS memberi gambaran nyata mengenai persoalan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Tingginya angka tenaga kerja tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, angka pengangguran di Indonesia masih tergolong cukup tinggi.⁹ Dari hasil kajian Bank Dunia dan LIPI soal ketenagakerjaan di Indonesia, mencoba merangkum lima permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan pelaku usaha, (1) *Outsourcing* merana karena kesejahteraan mereka sangat jauh tidak terpenuhi, (2) Gaji Rendah, walaupun sudah ada penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota tetapi untuk memenuhi standar kebutuhan minimal layak belum seimbang, (3) Lapangan kerja tidak sesuai dengan pendidikan, (4) Akses informasi lapangan kerja sulit, dan (5) keterampilan tenaga kerja rendah.

Sumber Daya Alam (SDA) yang seharusnya menjadi tumpuhan bagi mereka, akan tetapi tidak semua SDA dapat memberikan jaminan untuk kehidupan di daerah Kecamatan Tlanakan, dapat digambarkan dengan data demografi daerah kecamatan Tlanakan mempunyai luas wilayah 48,10 Km²

⁹ Lima masalah tenaga kerja dan lapangan kerja di Indonesia, merdeka.com, tanggal 17 Januari 2014

dengan jumlah penduduk sebanyak 59.156 jiwa, khususnya di 3 Desa Panglegur, Larangan Tokol dan Branta Pesisir tergolong wilayah yang tidak ada sumber air, sehingga tanaman di daerah tersebut mengandalkan air hujan (*tadah hujan*). Potret wilayah yang demikian serta tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai inovasi dan pengembangan perekonomian yang memadai juga menjadi faktor mereka harus mencari penghasilan yang semauanya sendiri. Kebiasaan malas, menginginkan sesuatu yang cepat tanpa usaha keras, keinginan mendapat bantuan secara terus menerus itulah gambaran di lokasi penelitian. Tidak ada upaya untuk melakukan perubahan pada diri sendiri akan tetapi menginginkan perubahan itu didorong dari pemerintah dengan jaminan pekerjaan yang mudah dan mendapatkan penghasilan yang memadai.

Penggalian atas pemberdayaan ekonomi kerakyatan dimaksudkan untuk penggalian potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi Rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi strategis dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam/Agraria secara Adil dan Berkelanjutan, yang berlandaskan pada substansi yang dimaknai bahwa Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berlandaskan pada "Alat Produksi/Faktor Produksi dan Proses Produksi" tetap berada dalam penguasaan, kontrol dan pengelolaan rakyat. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dapat dikembangkan melalui beberapa hal : (a) Mengembangkan ekonomi strategis berbasis potensi lokal berdasarkan akar budaya (*local wisdom*/kearifan lokal masyarakat); (b) Menumbuhkembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis rakyat atas dasar keswadayaan dan kemandirian; dan (c) Penguatan – penguatan institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem perekonomian kolektif dan penguatan permodalan secara swadaya dan mandiri. Konsep di atas, dapat dilakukan dengan ada satu tekad bersama antara pemerintah dan masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan, yang tentunya dengan segala potensi dapat dikerahkan baik melalui sumber daya alam, potensi lokal berdasarkan pada akar budaya (*local wisdom*/kearifan lokal masyarakat) serta penguatan institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat seperti dibentuknya koperasi-koperasi, lembaga-lembaga / perkumpulan pedagang-pedagang, penggrajin dan lain sebagainya.

4. Keperdulian pemerintah daerah dalam mengurangi beban hidup atau kondisi ekonomi para pengemis.

Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat

yang naik menjadi 49,50 Juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 Juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014. Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu: Menyempurnakan program perlindungan sosial, Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan masyarakat, dan Pembangunan yang inklusif.¹⁰

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing: Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.¹¹

¹⁰ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia,

¹¹ *ibid*

Dalam pemberian bantuan kepada masyarakat Pemerintah telah menerbitkan beberapa program, yaitu Program Kartu Keluarga Sehat / Jaminan Keluarga Sehat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin). Dari hasil penelitian di lapangan, dari berbagai program tersebut, masyarakat yang tergolong miskin di 3 Desa Kecamatan Tlanakan tersebut belum keseluruhan tersentuh, yang mereka peroleh selama ini masih program beras untuk keluarga miskin (Raskin) dan itupun diperoleh 3 kali dalam satu tahun yang besarnya 3,5 kg.

Di berbagai daerah persoalan pengemis sudah banyak meresahkan karena mereka melakukan kegiatannya di wilayah umum atau areal publik. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang larangan mengemis dan memberi kepada pengemis seperti di Depok Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang pembinaan dan pengawasan ketertiban umum, khususnya soal tertib sosial pada point Ke-8 huruf B yang mengatur tertib memberi, meminta sumbangan, mengemis dan mengamen. Larangan tentang pengemis di Jakarta juga telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam Pasal 40 perda tersebut, setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Larangan juga termasuk menyuruh orang lain menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Orang atau badanpun dilarang membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Berdasarkan perda itu, hukuman yang dapat diterima pemberi uang adalah maksimal 60 hari kurungan penjara dan denda sejumlah Rp 20 juta.

Dalam rangka menertibkan para pengemis sehingga tidak melakukan kegiatan di areal publik yang dapat menimbulkan keresahan baik bagi warga Pamekasan maupun bagi para tamu yang datang ke Pamekasan, maka seharusnya juga dibuat perda. Hasil wawancara dengan para pengemis perempuan, mereka juga siap bilamana dikemudian hari ada Perda yang mengatur tentang larangan mengemis, asalkan mereka tetap dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan pekerjaan yang mendapatkan jaminan.

5. Keinginan para pengemis untuk mengakhiri kebiasaan mengemis dan pekerjaan yang dapat memberi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Selama para pengemis perempuan melakukan kegiatan mengemis baik di jalanan, pertokoan, instansi pemerintah maupun dari rumah ke rumah,

sebenarnya ada beban psikologis dari mereka. Ada perasaan malu walaupun tanggapan atau sikap masyarakat terhadap mereka adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Mereka berkeinginan untuk mengakhiri kebiasaan mengemisnya dengan alasan mereka sudah tua dan tidak mampu lagi berjalan, mereka juga malu tetapi mereka menginginkan pekerjaan yang tidak berat bagi mereka karena kebutuhan untuk mencukupi beban hidup juga harus mereka lakukan. Tumpuan ekonomi keluarga lebih dibebankan kepada perempuan sehingga bilamana tidak ada penghasilan yang didapatkan dalam rumah tangga, istri atau perempuanlah yang melakukan pekerjaan mengemis. Sehingga untuk pengemis yang berasal dari Kecamatan Tlanakan lebih didominasi oleh pengemis perempuan, pengemis laki-laki hanya berkisar 10 % (sepuluh persen).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman para pengemis tentang mengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sedangkan yang mereka pahami tentang pekerjaan sebagai mata pencaharian adalah bekerja yang menghasilkan uang yang dapat dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya.
2. Pandangan dan pemahaman pengemis tentang kebutuhan minimal hidup hanyalah kebutuhan makan dan minum saja. Untuk mencukupi kebutuhan makan dalam satu hari mereka dapatkan sebanyak 2 (dua) kali dan kadang-kadang saja 3 (tiga) kali. Penghasilan yang mereka peroleh dalam tiap hari rata-rata Rp 15.000 sampai dengan Rp 30.000, sehingga kalau dibuat rata-rata pendapatan mereka tiap orang dalam satu bulan rata-rata Rp 600.000 sampai Rp 900.000. Sedangkan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh masing-masing keluarga selain makan dan minum dalam satu bulan rata-rata : untuk kebutuhan listrik sebesar Rp 30.000, pembelian air sebesar Rp 20.000, dan uang sekolah anak (dengan pendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama) atau untuk uang jajan sebesar Rp 100.000. Kebutuhan akan papan/rumah, rata-rata pengemis perempuan menempati rumah yang berasal dari warisan orang tua atau nenek moyang mereka. Sedangkan untuk kebutuhan sandang/pakaian mereka kurang memperhatikan, dalam satu tahun mereka hanya membeli satu kali saja dan juga kadang-kadang ada orang-orang yang merasa iba sehingga diberi. Mengingat pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak dapat dihindari sedangkan penghasilan yang relatif belum dapat mencukupi, maka kehidupan mereka sangat jauh

dari kecukupan. Sebagai tambahan penghasilan mereka mengemis sambil mencari botol-botol, koran, kardus untuk dapat dijual (sebagai pemulung).

3. Pandangan para pengemis tentang ketersediaan lapangan kerja dan peran pemerintah dalam akses lapangan kerja, di Kecamatan Tlanakan tergolong wilayah yang tidak ada sumber air, sehingga tanaman di daerah tersebut mengandalkan air hujan (*tadah hujan*). Potret wilayah yang demikian serta tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai inovasi dan pengembangan perekonomian yang memadai menjadi faktor mereka harus mencari penghasilan yang semauanya sendiri. Kebiasaan malas, menginginkan sesuatu yang cepat tanpa usaha keras, keinginan mendapat bantuan secara terus menerus itulah gambaran di lokasi penelitian. Tidak ada upaya untuk melakukan perubahan pada diri sendiri akan tetapi menginginkan perubahan itu didorong dari pemerintah dengan jaminan pekerjaan yang mudah dan mendapatkan penghasilan yang memadai.
4. Keperdulian pemerintah daerah dalam mengurangi beban hidup atau kondisi ekonomi para pengemis. Program bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin di 3 Desa Kecamatan Tlanakan tersebut belum keseluruhan tersentuh, yang mereka peroleh selama ini masih program beras untuk keluarga miskin (Raskin) dan itupun diperoleh 3 kali dalam satu tahun yang besarnya 3,5 kg.
5. Keinginan para pengemis untuk mengakhiri kebiasaan mengemis dan pekerjaan yang dapat memberi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selama para pengemis perempuan melakukan kegiatan mengemis baik di jalanan, pertokoan, instansi pemerintah maupun dari rumah ke rumah, sebenarnya ada beban psikologis dari mereka. Ada perasaan malu walaupun tanggapan atau sikap masyarakat terhadap mereka adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Mereka berkeinginan untuk mengakhiri kebiasaan mengemisnya dengan alasan mereka sudah tua dan tidak mampu lagi berjalan, mereka juga malu tetapi mereka menginginkan pekerjaan yang tidak berat bagi mereka karena kebutuhan untuk mencukupi beban hidup juga harus mereka lakukan.

Saran

1. Pemerintah Daerah segera melakukan pendampingan kepada para pengemis perempuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat baik dari segi pemberian keterampilan dan pendanaannya.

2. Peranan Ulama', tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum untuk memberikan pemahaman kepada pengemis tentang kebiasaan mengemis yang tidak baik.
3. Pemerintah Daerah segera menyusun dan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang larangan mengemis dan larangan pemberian sesuatu kepada pengemis.

Daftar Pustaka

- Bawani, Imam, dkk., *Buruh Pabrik - Pemberdayaan Buruh Pabrik Berbasis Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta : LKis, 2011
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Affist, 1990
- Harun, Nurlaila, *Potensi Kerja Wanita Lapisan Bawah Pada Sektor Informal*, Manado : STAIN Manado Press, 2013
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Laode Sabania, Rais, Perkumplan Wallancea Kota Palopo Wabana - Lingkungan Lestari Celebes Area*
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Rahardjo, Darwam, *Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994
- Setiawan, *Konflik Sosial: Kajian Sosiologi Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta : UI Press, 1988
- Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980
- Supraptiningsih, Umi, *Pengemis Anak di Kabupaten Pamekasan (Karakteristik, Sosial, Ekonomi dan Perlindungannya)*, penelitian kolektif DIPA STAIN Pamekasan, 2007
- Syamsuddin, Sahiron, *Islam Tradisi dan Peradaban*, Yogyakarta : Bina Mulia Press bekerjasama dengan SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*.

Umi Supraptiningsih